

PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA SUATU KEHARUSAN ATAU WACANA^{*)}

Oleh:

Sutikno

Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada
Pusat Studi Bencana, Universitas Gadjah Mada

INTISARI

Wacana untuk memindahkan ibu kota negara telah berulang kali muncul, yakni ketika timbul kejadian kritis akibat faktor sosial, ekonomi politik, lingkungan dan bencana. Ibu kota negara mempunyai fungsi sentral bagi Pemimpin negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Kondisi aman, nyaman, kondusif dari ibu kota negara merupakan bagian penting dalam memikirkan dan mengkoordinasikan jalannya pemerintahan agar negara dan bangsa maju sejajar dengan negara maju lainnya, serta rakyatnya cerdas, sejahtera secara berkeadilan. Ibu kota negara menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri dan harga diri bangsa dan negara. Kondisi umum yang mencitrakan Jakarta sebagai ibu kota negara adalah tata ruangnya semrawut, kemacetan lalu lintas banyak terjadi, ketimpangan sosial ekonomi sangat tinggi, tata guna lahannya tumpang tindih, pencemaran udara dan air telah terjadi, dan sering terlanda bencana banjir. Kondisi umum tersebut memunculkan beberapa pertanyaan antara lain: masih layakkah Jakarta sebagai ibu kota negara?; perpindahan ibu kota suatu keharusan atau wacana. Makalah ini mencoba mendiskusikan pertanyaan tersebut dengan sudut pandang geografis. Pendekatan keruangan, ekologis dan kewilayahan digunakan untuk mendiskusikan kelayakan Jakarta sebagai ibu kota negara. Hasil diskusi terungkap bahwa Jakarta kurang layak sebagai ibu kota negara, perpindahan ibu kota menjadi suatu keharusan yang seharusnya dilaksanakan dan bukan lagi sebagai wacana. Beberapa alternatif lokasi untuk memindahkan ibu kota negara pernah diwacanakan, perlu kajian yang mendalam untuk menentukan dimana dan kapan harus direalisasikan perpindahannya.

^{*)} Makalah dipresentasikan dalam: Diskusi Sejarah, Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah; 11-12 April 2007. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta

PENDAHULUAN

Sepengetahuan penulis sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memproklamakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, belum pernah mendirikan kota sebagai ibu kota negara atau ibu kota nasional. Kota-kota besar yang sekarang menjadi ibu kota negara (Jakarta) dan ibu kota provinsi semuanya atau sebagian besar merupakan tinggalan kolonialisme Belanda. Sangat berbeda dengan jaman kejayaan kerajaan di nusantara dahulu, sebelum jaman penjajahan, hampir semua mempunyai dan membangun ibu kota (kota raja). Sebagai contoh Majapahit mempunyai tinggalan situs

Trowulan yang sementara ini dianggap sebagai pusat pemerintahannya; Mataram dengan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahannya. Perpindahan pusat pemerintahan pada jaman kerajaan sering terjadi. Apabila suatu kerajaan tertimpa bencana pusat kerajaan harus pindah karena anggapannya terkena kutukan dewa. Pergantian rajapun sering diikuti dengan perpindahan pusat pemerintahan, apalagi kalau pergantiannya melalui perebutan.

Bagaimana halnya dengan NKRI, tampaknya para pemimpin NKRI diawal kemerdekaan mempunyai filsafat: **tiada rotan akarpun jadi dan narimo**. Dalam arti bahwa daripada membangun ibu kota baru dan istana negara baru, yang ada sajalah dimanfaatkan, yakni memanfaatkan bekas kantor gubernur penjajah sebagai istana kenegaraan. Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena negara yang baru merdeka dan terjajah selama lebih dari 3 abad belum mempunyai kemampuan untuk membangun. Setelah merdeka selama hampir genap 62 tahun niat untuk mendirikan istana negara dan ibu kota NKRI hasil karya anak bangsa setelah memperoleh kemerdekaan belum muncul. Mungkin saja para pemimpin kita ini telah menikmati kemewahan yang ditinggalkan oleh penjajah dan disibukkan pula untuk memikirkan kedudukan dan golongannya dan kurang memikirkan kesemestaan NKRI ini.

Pemindahan ibu kota negara banyak dilakukan oleh banyak negara, dengan alasan yang berbeda-beda. Contoh berikut memberikan gambaran bahwa pemindahan ibu kota negara itu tidak tabu dan dilakukan dengan tujuan memecahkan permasalahan untuk menuju ke perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara.

- 1) Brasilia ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama Rio Jenairo sudah terlalu padat.
- 2) Pemerintah Korea Selatan da;lam tahun 2004 ibu kotanya pindah dari Seoul ke Sejong, meskipun Seoul itu berarti ibu kota dalam bahasa Korea.
- 3) Ibu kota tradisional secara ekonomi memudar oleh kota pesaingnya, seperti Nanjing oleh Shanghai.
- 4) Menurunnya suatu dinasti atau budaya dapat juga ibu kota yang telah ada mati/pudar/kalah pamor seperti di Babilon dan Cahokia.

Selain ibu kota negara dipindahkan terdapat juga pemindahan sebagian dari kekuasaan pemerintah, contoh berikut dapat dijadikan salah satu alternatif untuk pemecahan masalah yang terkait dengan ibu kota negara.

- 1) Bolivia: Sucre masih ibu kota konstitusional tetapi pemerintahan nasional telah lama ditinggalkan dan beralih ke La Paz.
- 2) Chili: Santiago masih dianggap sebagai ibu kota meskipun Kongres Nasionalnya di Valparaiso.
- 3) Belanda: Amsterdam ibu kota nasional konsitusional, meskipun pemerintahan Belanda, parlemen, istana ratu semuanya terletak di Den Haag.
- 4) Afrika Selatan: ibu kota administratif di Pretoria, ibu kota legislatifnya di Cape Town dan ibu kota judisialnya di Bloemfontein (Wikipedia, 2007).

Pemindahan sebagian kekuasaan pemerintah di NKRI sangat dimungkinkan, karena di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya tidak diatur secara tegas. Dalam Bab II ayat (2) UUD NKRI tertulis: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam UUD tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan dimana dan bagaimana ibu kota negara diatur. Dengan demikian terdapat fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur, termasuk memindah ibu kota negara. Dalam pemindahan ibu kota negara tentunya perlu ada alasan yang kuat dan mendasar tentang efektifitas fungsinya.

ARTI DAN FUNGSI SUATU IBU KOTA NEGARA

Ibu kota (*a capital; capital city; political capital*) adalah kota utama yang diasosiasikan dengan pemerintahan suatu negara; secara fisik difungsikan sebagai kantor pusat dan tempat pertemuan dari pimpinan pemerintahan dan ditentukan berdasarkan hukum. Asal katanya dari bahasa Latin *caput* yang berarti kepala (*head*) dan terkait dengan kata *capitol* yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan.

Sejarahnya, ibu kota sebagai pusat ekonomi utama dari suatu wilayah sering menjadi titik pusat dari kekuatan politik, dan menjadi suatu ibu kota melalui suatu penaklukan atau

penggabungan. Ibu kota secara alamiah mempunyai daya tarik politik dan kepewaiian yang diperlukan untuk efisiensi administrasi pemerintahan seperti ahli hukum, jurnalis, peneliti kebijakan publik. Ibu kota adalah pusat ekonomi, budaya atau pusat intelektual.

Ibu kota menjadi simbol bagi negara dan pemerintahannya, dan sebagai tempat berkembangnya muatan politik. Kota kota abad pertengahan, pemilihan, relokasi, pendirian dari suatu ibu kota modern dilandasi dengan emosional. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut.

1. Athena yang hancur dan hampir tak berpenduduk dijadikan ibu kota baru bagi Greece, sebagai simbol kejayaan masa lalu. Hal yang mirip adalah Perang Dingin dan Reunifikasi Jerman, Berlin menjadi ibu kota lagi bagi Jerman.
2. Suatu relokasi simbolik dari ibu kota ke lokasi periperi geografis dan demografis dengan alasan ekonomi atau strategi (sering disebut ibu kota masa depan atau ibu kota pelopor). Peter I dari Rusia memindahkan pemerintahan dari Mosko ke Sain Petersburg untuk memberikan kebesaran Rusia beorientasi ke barat.
3. Kemal Ataturk memindahkan pusat pemerintahan dari Ottoman Istanbul ke Ankara.
4. Kaisar Ming memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Beijing untuk menjauhi Mongols dan Manchus.

Ibu kota mempunyai fungsi stratejik, ibu kota selalu menjadi target utama dalam peperangan, karena dengan menguasai ibu kota biasanya menjadi jaminan menguasai sebagian besar musuh atau penentang, paling tidak memerosotkan moral untuk mengalahkan musuh (militer). Seperti halnya yang terjadi di China masa lalu, dimana pemerintahan tersentralisir dengan sedikit fleksibilitas pada tingkat provinsi, suatu Dinasti dapat runtuh dengan ambruknya ibu kota. Oleh sebab itu Dinasti Ming memindahkan Ibu kota Nanjing ke Beijing dengan alasan agar dapat mengontrol musuh yang berasal dari Mongols dan Manchus.

Dalam kaitannya dengan fungsi stratejik suatu ibu kota negara ada yang berpandangan lain bahwa ibu kota negara kurang penting sebagai sasaran militer. Karena pusat

pemerintahan dapat dipindahkan ke tempat lain. Sebagai contoh tentara Inggris yang menyerang beberapa ibu kota Amerika berulang kali dalam Perang Revolusi dan Perang tahun 1812, tentara Amerika tetap dapat bertempur dari luar kota, dimana mereka didukung oleh pemerintah setempat dan penduduk civil di perbatasan. Perkecualiannya adalah Perancis, yang birokrasinya terpusat tetap dapat terkordinisasi secara efektif dan terdukung oleh sumberdaya yang sangat luas, menjadikan negaranya sangat kuat melebihi pesaingnya, tetapi berisiko tinggi jika ibu kota diduduki musuh; dalam strategi militernya. Ancaman tradisional dari Perancis adalah Jerman terfokus untuk menguasai Paris. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, ketika Jakarta jatuh oleh tentara Belanda sewaktu perang revolusi ibu kota negara pernah berpindah ke Yogyakarta dan ke Bukit Tinggi. Dengan demikian pemerintahan tetap berjalan, sehingga NKRI tetap berdiri dengan melakukan perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan.

KONDISI JAKARTA SEBAGAI IBU KOTA

Menurut sejarah, kota Jakarta berawal dari pekan pelabuhan kecil yang dikenal sebagai Sunda Kelapa, yang kemudian menjadi Kota Batavia. Pernah seorang pengembara Inggris terkenal, Kapten James Cook mengatakan pelabuhan di situ adalah kawasan labuhan kapal besar dan kecil terbaik di dunia ketika itu. Kota yang telah berumur hampir 500 tahun tersebut telah mengalami perkembangan yang cepat dan sering terlanda banjir. Dalam catatan sejarah, pada tahun 1872 akibat meluapnya Sungai Ciliwung menjebolkan pintu air dan merendam kawasan Batavia. Kejadian serupa muncul pada 9 Januari 1932, hujan yang turun lebat sepanjang malam menyebabkan hampir semua wilayah kota Batavia terendam dan Jalan Sabang tercatat sebagai paling parah. Upaya penanggulangan banjir Jakarta sebenarnya telah diusahakan seperti pada masa pemerintahan Belanda tahun 1920 ketika seorang insinyur Belanda, Van Breen memimpin pembangunan saluran (banjir kanal) dan sejumlah pintu air. Semuanya untuk mengakomodasi air yang datang.

Masalah banjir Jakarta memang sulit diatasi tanpa ada suatu usaha menyeluruh dan terpadu. Amblesan tanah akibat penurapan airtanah yang berlebih menjadi salah satu penyebab daerah menjadi sasaran banjir. Secara alami Jakarta memang rawan terhadap

banjir, karena terletak pada kipas aluvial yang berkembang dari Selatan (Bogor) dan dialiri oleh 13 sungai dengan daerah hulunya bercurah hujan tinggi, yang sebagian lahannya telah terbangun. Faktor alami lainnya adalah di bagian Utara terdapat beting gisik (beach ridges) yang dapat menghambat aliran ke laut Teluk Jakarta. Sebenarnya pada beting gisik itupun terdapat cekungan antar beting yang dapat berfungsi sebagai penampung air, namun itupun sudah terbangun. Demikian juga sebagian besar situ-situ yang berfungsi sebagai penampung dan pengendali air hujan lokal itupun sudah menjadi lahan permukiman.

Hampir setiap tahun terjadi banjir yang besarnya bervariasi. Banjir yang terjadi tahun 2007 merupakan yang terbesar, hampir mencakup 70% wilayah Jakarta. Akibat banjir 2007 tersebut menimbulkan pemikiran atau gagasan untuk memindahkan Ibu Kota Jakarta. Banjir dijadikan salah satu pemicu ide untuk memindahkan ibu kota. Gagasan untuk memindahkan ibu kota negara telah mengemuka dalam berbagai kesempatan antara lain tanggal 20 Mei 1988 ketika gerakan reformasi. Waktu itu kondisi Jakarta sangat mengkhawatirkan sehingga muncul gagasan spontan, agar Yogya untuk menerima kembali fungsi ibu kota pemerintahan. Pemikiran untuk memindahkan ibu kota negara juga datang dari Ketua DPR Agung Laksono dengan argumentasi sedikit berbeda, dan menyatakan bahwa Jakarta sudah saatnya kantor presiden yang menjadi pusat pengendali pemerintahan dipindahkan ke tempat yang lebih kondusif. Jakarta saat ini dinilai sudah kelebihan beban, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga Jakarta mempunyai multi fungsi. Ibu kota negara yang mempunyai multi fungsi umumnya akan menimbulkan berbagai dampak.

DAMPAK MULTI FUNGSI DARI JAKARTA

Multi fungsi Jakarta merupakan dampak dari sistem pemerintahan sentralistis dan sistem multi fungsi yang memusat di Jakarta. Akibatnya sejumlah dampak sosial, politik, ekonomi dan ekologi menjadi beban Jakarta, berikut dampak yang dimaksud (Baiquni, 2004).

1. Pemerintahan sentralitis yang dikendalikan secara otoriter dan serba seragam telah mengabaikan kemajemukan sosial budaya masyarakat dan keseragaman ekosistem wilayah negara kepulauan. Sistem kekuasaan yang memusat, membuat sistem pemerintahan daerah kehilangan kemandirian dan fungsi birokrasi tidak dapat berkembang melayani dan memfasilitasi partisipasi masyarakat, tetapi lebih melayani atasan atau pimpinan elitnya.
2. Kedekatan sumber pusat pemerintahan dan pusat ekonomi yang mengerucut pada elite dan hampir tanpa kontrol dari rakyat secara konstitusional maupun publik menyebabkan mewabahnya korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Pemusatan fungsi tersebut akhirnya membawa beban bagi Jakarta yang ditandai dengan ledakan jumlah penduduk, kemacetan lalu lintas, kesenjangan ekonomi, kerawanan sosial, kekerasan dan kejahatan.
4. Permasalahan tersebut diikuti krisis ekologi, yang berupa pencemaran udara, pencemaran airtanah, air bersih, banjir rutin, tata ruang yang semrawut, munculnya kawasan kumuh, lingkungan hidup yang kurang nyaman.
5. Konflik mudah terjadi antara kepentingan ekonomi dan ekologi, kepentingan sesaat dan jangka panjang, kepentingan elit dan masyarakat.

Berdasarkan kondisi Jakarta dan berbagai dampak tersebut perlu dipertanyakan masih layakkah Jakarta sebagai ibu kota negara, dan apakah pemindahan ibu kota sebagai suatu keharusan atau sekedar wacana.

PEMINDAHAN IBU KOTA SUATU KEHARUSAN ATAU WACANA

Analisis garis besar aspek keruangan, ekologis dan kewilayahan serta dampak sosial, ekonomi, dan politik, menghasilkan suatu pemikiran bahwa: (i) pemindahan ibu kota merupakan suatu keharusan, tetapi dengan tenggang waktu, dan seharusnya tidak sebagai wacana lagi; (ii) ibu kota negara tetap di Jakarta tetapi pemindahan beberapa departemen dan pusat-pusat kegiatan dialihkan ke luar Jakarta. Argumentasi dari masing-masing pemikiran adalah sebagai berikut.

Secara keruangan Jakarta sudah terlalu padat penduduk, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan tata ruangnya semrawut, pemanfaatan lahan

yang saling kontradiktif banyak terjadi. Pembangunan fisik terus dipacu tanpa arah yang jelas. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang sedemikian bagus disusun Bang Ali, (1966-1977), dengan mudahnya dapat berubah sehingga banyak peruntukan kota yang dilanggar. Banyak situ-situ yang berfungsi sebagai penampung air hilang menjadi perumahan. Program proyek kali bersih (prokasih) macet total. Tiga belas kali yang membelah kota ini tetap menjadi kubangan sampah. Rencana Induk 1965-1985 tidak berkelanjutan pada Rencana Induk 1985-2005, sangat dimungkinkan banyak campur tangan pihak pengusaha, terutama developer dengan para pejabat Pemda Jakarta. Kemacetan lalu lintas setiap saat, dan banjir yang setiap tahun terjadi menunjukkan bahwa tata ruang kurang memperhatikan karakteristik lahan serta kurang mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Secara keruangan Jakarta sebagai ibu kota negara tidak mungkin menampung datangnya urbanit di masa depan. Jakarta mempunyai daya tarik bagi penduduk di luar Jakarta dan bahkan dari manca negara, lapangan pekerjaan terpusat dan sebagian besar uang beredar disana. Urbanisasi yang terus menerus dan urbanit yang kurang ketrampilannya dan pendidikannya akan menjadi tambahan beban bagi Jakarta. Urbanisasi dapat dicegah dengan cara pemerataan lapangan kerja dengan membangun pusat pertumbuhan di wilayah lain. Secara ekologis sebagian besar wilayah Jakarta telah mengalami degradasi kualitas lingkungannya, dengan indikator banjir, pencemaran udara, pencemaran air, pembuangan limbah cair/padat dan pencemaran sosial. Banjir yang menggenangi 70% wilayah Jakarta memberikan kerugian yang sangat besar, hasil pembangunan yang memerlukan biaya yang tinggi dan waktu lama terkadang rusak, atau hilang dalam waktu yang singkat. Sanitasi lingkungan menjadi lebih buruk akibat banjir, sehingga banyak penyakit yang mewabah; ledakan demam berdarah di Jakarta merupakan bukti bahwa sanitasi lingkungan kurang memadai. Momentum banjir Jakarta tahun 2007 perlu dijadikan pemikiran, perencanaan untuk memindahkan ibu kota Jakarta, karena umumnya bencana alam itu cepat dilupakan.

Secara kewilayahan Jakarta sudah amat padat penduduk dan syarat dengan fasilitas, sedang di luar Jakarta, baik di Jawa maupun luar Jawa masih tersedia wilayah yang memungkinkan untuk pengembangan. Tersedianya jaringan transportasi yang baik memungkinkan kelancaran arus manusia, informasi dan jasa antar wilayah. Dengan

demikian tidak ada alasan dalam koordinasi antar pejabat dan negara dan antar departemen seandainya terjadi pemisahan antara pimpinan negara dengan menteri atau lembaga. Ditinjau dari strategik dalam menghadapi situasi kritis (perang) pusat kekuasaan negara yang tersentralisir mempunyai risiko tinggi. Jika ibu kota negara sebagai pusat kekuasaan negara jatuh, maka akan berakibat buruk terhadap keberlangsungan suatu negara.

Uraian di atas menyatakan bahwa pemindahan ibu kota merupakan suatu keharusan, tetapi dengan tenggang waktu. Tenggang waktu diperlukan untuk memperoleh legal formal, menjanging pendapat, menyusun program, memilih lokasi yang sesuai, menyusun rencana dan membangunnya. Pemindahan ibu kota tidak seperti membalik telapak tangan, perlu pemikiran yang mendalam.

Alternatif ke dua pemindahan ibu kota negara tetap di Jakarta, dengan pemindahan beberapa departemen dan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan ke luar Jakarta, dengan tujuan mengurangi beban Jakarta. Alternatif ini tampaknya lebih banyak menghadapi kesulitan berbanding alternatif pertama. Beban Jakarta dikurangi tidak berarti akan meniadakan masalahnya, karena banjir tetap menjadi ancaman, apalagi jika pemindahan pusat kegiatan ke arah selatan Jakarta, banjir akan semakin meningkat bila tidak diikuti dengan usaha konservasi lahan atasnya. Kejadian banjir di Jakarta tidak meliputi seluruh wilayahnya, masih ada sebagian yang tidak terkena. Bagi penduduk yang tinggal di daerah yang tidak terkena banjir tentunya tidak sependapat apabila ibu kota negara dipindahkan, dan menghendaki tetap dipertahankan. Apabila dasar pemikirannya sempit dan jangka pendek maka alternatif ke dua yang dipilih. Namun dalam pemikiran yang lebih luas dan jangka panjang bahwa Indonesia dengan potensi sumberdaya alamnya yang melimpah dan sumberdaya manusia yang cukup besar akan menjadi negara yang besar dan kuat, maka alternatif pemindahan ibu kota ke dua menjadi lemah.

ALTERNATIF PENENTUAN IBU KOTA NEGARA

Jajak pendapat terhadap karyasiswa Program S2 Geografi menghasilkan pandangan bahwa ibu kota negara perlu dipindahkan. Banyak alternatif yang disampaikan meskipun belum disertai dengan argumentasi yang matang. Daerah yang diusulkan untuk dipilih pemindahan ibu kota negara adalah: tetap di P. Jawa di luar Jakarta, Kalimantan, dan Sumatra. Sebelum menentukan alternatif untuk menentukan pilihan lokasi pemindahan ibu kota negara, terlebih dahulu perlu dicari rumusan ibu kota negara yang ideal. Penelusuran pustaka tentang syarat ibu kota negara yang ideal belum ditemukan; berdasarkan pemikiran geografis ibu kota negara yang ideal harus mempertimbangkan aspek spasial, ekologis dan kewilayahan antara lain adalah: tersedia lahan yang sesuai, aman, nyaman, lingkungan sehat, bebas dari bahaya dan bencana, aksesibilitas dan arus informasi memadai, ketersediaan lahan untuk perwakilan negara sahabat (kedutaan), ketersediaan air bersih, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, masyarakat sekitar kondusif dan tidak menimbulkan ketimpangan antara wilayah. Berdasarkan rumusan tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia untuk menentukan alternatif lokasi sebagai calon ibu kota negara.

Beberapa pandangan tentang alternatif pemindahan ibu kota negara yang muncul pada periode bulan Mei 1988 (gerakan reformasi) adalah Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Malang dan Kalimantan Tengah (Baiquni, 2004). Alternatif lokasi tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan.

Yogyakarta keunggulannya pernah menjadi ibu kota negara dan berfungsi dengan baik, fasilitas transportasi tersedia (Bandara Adi Sutjipto, dan Stasiun KA. Tugu). Yogyakarta terkenal dengan kota pelajar, kota budaya, sehingga telah berpenduduk padat dan jalan sempit, sehingga kurang memungkinkan untuk ditambahi beban; kecuali dengan pembenahan aksesibilitas, pemilihan lokasi yang tepat dan tidak menempati lokasi bangunan tinggalan Belanda.

Magelang letaknya di tengah P. Jawa sering dikenal dengan *pakuning tanah Jawa* berarti daerahnya mantap. Namun demikian lokasinya berdekatan dengan Gunungapi Merapi yang masih aktif, sehingga bahaya vulkanik sebagai ancaman. Aksesibilitas dapat didukung dari Yogyakarta dan Semarang.

Purwokerto mempunyai kelebihan ketersediaan ruang (lahan) yang masih dimungkinkan untuk pembangunan ibu kota. Aksesibilitas laut dapat terdukung dari pelabuhan Cilacap, sedang akses darat dapat dari Yogyakarta dan Bandung. Transportasi udara perlu dibangun. Gunungapi Slamet mungkin merupakan bahaya, tetapi berdasarkan sejarahnya, kurang aktif; dan terdapat daerah yang layak sebagai tempat peristirahatan (Baturaden).

Malang mempunyai lingkungan pegunungan yang sejuk, terdukung oleh aksesibilitas darat dan udara yang memadai dengan Surabaya. Namun demikian Malang termasuk kota pelajar dan padat penduduk, jalan di dalam kota umumnya sempit.

Alternatif pemilihan lokasi untuk merealisasikan gagasan pemindahan ibu kota negara tersebut harus tidak menempati kota lama, tetapi harus lokasi baru yang sesuai. Lokasi baru yang terpilih harus dibangun sebagai ibu kota yang mencerminkan jati diri bangsa.

Berdasarkan alternatif lokasi di P. Jawa tersebut, Purwokerto merupakan salah satu pilihan ditinjau dari ketersediaan lahan; kota lain yang disebutkan di atas juga mempunyai kemungkinan untuk dipilih dengan mendasarkan pada kelebihan dan kekeurangan masing-masing. Namun demikian evaluasi tersebut baru dilakukan secara dangkal, perlu dukungan data yang lebih banyak dan akurat. Alternatif tersebut bukan harga mati, baru sebagai wacana lokasi yang diperkirakan layak, masih terbuka bagi masukkan dengan pertimbangan dari sudut keilmuan yang lain. Seandainya alternatif yang terpilih tadi menjadi kenyataan itupun berlaku dalam waktu tertentu, mungkin 50 tahun atau 100 tahun. Dasar pertimbangannya adalah setiap pembangunan ibu kota baru tentu diikuti oleh pembangunan ikutannya, sehingga dalam kurun waktu tersebut ibu kota baru sudah penuh dengan beban baru lagi, sehingga perlu pindah lagi. Dengan azas tersebut ketimpangan antar wilayah dapat dihindari.

Alternatif pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa, pilihannya adalah Kalimantan dan Sumatra. Kelebihan dari Kalimantan adalah lokasinya merupakan pusat dari wilayah Nusantara. Lahan masih sangat luas, sehingga dapat menyusun tata ruang ibu kota negara yang sangat ideal. Kelemahannya adalah prasarana dan sarana belum memadai, sebagian besar harus membangun yang baru, berarti biaya mahal. Kelemahan lainnya adalah

penyediaan air bersih; kebakaran hutan, banjir dan longsor merupakan bahaya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan. Sumatra merupakan alternatif lain, ketersediaan lahan memadai; sebelah barat Bukit Barisan rawan terhadap bencana gempa, sehingga daerah yang sesuai tentunya di sebelah timur Bukit Barisan.

Alternatif pemindahan lokasi ibu kota negara tersebut di atas, baik yang tetap di P. Jawa maupun di luar P. Jawa merupakan embrio pemikiran yang masih perlu didiskusikan secara mendalam. Tentunya masih banyak alternatif lain untuk pemindahan ibu kota negara, mengingat jumlah pulau di Indonesia lebih dari 17.000. Untuk pemilihan lokasi ibu kota perlu peraturan perundang-undangan. Undang-undang tata ruang saat ini sedang digodog di DPR, mudah-mudahan persyaratan ibu kota negara tidak terlewatkan atau terabaikan.

PENUTUP

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah merdeka hampir genap 62 tahun, ibu kota negaranya (Jakarta) menempati bekas ibu kota penjajah (yang menjajah selama lebih dari tiga abad). NKRI belum memiliki ibu kota negara yang merupakan pemikiran, hasil karya anak bangsa. Jakarta yang sekarang dijadikan sebagai ibu kota negara telah berumur lebih dari 577 tahun berkembang menjadi metropolitan, mempunyai multi fungsi, sarat dengan beban sehingga banyak dampak ekonomi, sosial, politik dan ekologis.
2. Ibu kota negara (Jakarta) sebagai simbol kewibawaan negara dan jati diri bangsa saat ini dan masa depan kurang layak untuk dipertahankan, karena sebagai pemusatan kekuasaan dan pemusatan ekonomi banyak menimbulkan KKN, berpenduduk padat, tata ruang sewrawut, kemacetan lalu lintas, berbagai konflik kepentingan, pencemaran, setiap tahun terlanda banjir, dan sanitasi lingkungan kurang memadai. Pemusatan kekuasaan dan kegiatan di ibu kota mempunyai risiko tinggi dalam kondisi kritis (perang), ibu kota menjadi sasaran untuk diserang.
3. Pemindahan ibu kota negara Jakarta menjadi suatu keharusan, bukan merupakan wacana lagi. Keharusan bertenggang waktu, menanti perundangan-undangan tata ruang termasuk persyaratan suatu ibu kota negara.

4. Alternatif lokasi pemindahan ibu kota yang pernah muncul sebagai wacana antara lain: Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Malang, Kalimantan dan Sumatra. Alternatif lokasi tersebut bukan harga mati, harus didiskusikan secara mendalam, alternatif lain dapat dimunculkan.
5. Dalam menatap ke depan untuk menyongsong NKRI menjadi besar, kuat dan berwibawa pemikiran, gagasan untuk memindahkan ibu kota negara harus terus dikumandangkan, sehingga menjadi realita. Paling tidak terjadi penyebaran pusat-pusat pertumbuhan di seluruh wilayah, sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi kenyataan.

DAFTAR BACAAN

Anonim, 2007. Masih Layakkah Jakarta Jadi Ibu Kota?. Jawa Pos, 6 Februari 2007-04-06

Anonim, 2002. Benang Kusut Ibu Kota Jakarta. Sinar Harapan 6 Juni 2002.

Anonim, 2002. Banjir Jakarta Sulit Diatasi. Pikiran Rakyat, 19 Oktober 2002.

Baiquni, M.; Susilowardani. 2002. *Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan*. Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia. Penerbit Transmedia Global Wacana. Yogyakarta.

Baiquni, M. 2004. *Membangun Pusat-pusat di Pinggiran*. Ideas. Yogyakarta.

Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan dan Perkotaan & Wilayah*. Penerbit ITB. Bandung.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Capital>.